

Lampiran 22: Framework Matrix Wawancara tentang Kekurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

Nama	a. Penyampaian Dokumen Perencanaan di Tingkat SKPD Tidak Tepat Waktu	b. Sebagian Besar Masyarakat Belum Bisa Mengakses Informasi PKD	c. Tidak Ada Petugas yang Mengakuntasikan Transaksi di PPKD	d. Masih Adanya Persoalan Rent Seeker dan Penyerapan Anggaran Rendah	e. Kurangnya Strategi Pengelolaan Aset yg Bisa Meningkatkan Pendapatan Daerah
3 : Khamdan Syakiri, S.Psi	<p>Kalo perencanaan sih.. masalahnya kan kita dikejar deadline waktu ya.. ini ya.. sesuai dengan Permendagri kan ada batasan-batasan waktu kapan dia harus ditetapkan, kapan mungkin akan dilaksanakan, kapan (00.32) harus diserahkan ke DPRD, kendalanya itu kadang-kadang e.. bahan-bahan dari OPD itu terlambat masuk ke kita iya.., usul-usulan kegiatan dari OPD itu terlambat masuk ke kita jadi ya.. karena kita dikejar waktu kemudian bahannya terlambat ya... akhirnya kadang-kadang kita lembur untuk mengejar itu</p>				
8 : Drs. Nur Hadiyanto, M.Acc.				<p>Nah, ee ya ini persoalan rent seekers, pemburu rente ini masih apa Mas, menjadi persoalan yang besar dikita nggih. Artinya saya itu sok tanda tangan SP2D kemudian melihat dokumen belanja dnegan foto-foto, dengan pack. Kadang-kadang merasa kok ini mahal banget nek dikerjakan oleh ee rekanan pihak ketiga itu kan dia harus memperhitungkan pajak, kemudian laba yang diperkenankan, laba wajar yang diperkenankan 10%, pajak 10%, biaya-biaya yang lain. Termasuk mungkin ngasih Pimpronnya. Hehehe. Jadi jatuhnya mahal.</p> <p>Ya kalau dinilai apa ya, mungkin secara kasat mata saja gawean pemeliharaan kayak gitu kok. Nilainya 100 juta ini lo, haduuh. Hehe. Kadang-kadang seperti itu. Ya mungkin masih terjadilah. Jadi persoalan di, karena memang</p>	

Nama	a. Penyampaian Dokumen Perencanaan di Tingkat SKPD Tidak Tepat Waktu	b. Sebagian Besar Masyarakat Belum Bisa Mengakses Informasi PKD	c. Tidak Ada Petugas yang Mengakuntasikan Transaksi di PPKD	d. Masih Adanya Persoalan Rent Seeker dan Penyerapan Anggaran Rendah	e. Kurangnya Strategi Pengelolaan Aset yg Bisa Meningkatkan Pendapatan Daerah
				<p>kalau semuanya jadi kewenangan, kita, kita sendiri yang juga terlalu berat nggih, kewewegen gitu nek wong Jowo nggih. Kalau kami sampai harus sampai dengan substansinya, sampai dengan materialnya, barangnya, ngecek yo bukan tugas kami. Artinya itu tugasnya inspektorat kan donge. Hehehe. Ngeriti.</p>	
12 : Kuni Mas'adah				<p>e.. pengalaman sebagai PPTK ada.. ketika panjar tidak bisa dibayarkan semuanya karena apa.. katkanlah e... ketika kita melaksanakan lembur ternyata anggaran kas lembur kita katakanlah untuk 5 hari tapi e.. pelaksanaan kegiatan kita ternyata dilaksanakan lembur 2 hari sudah cukup artinya akan ada sisa, sisa yang tidak bisa kita laksanakan yang panjar itu, panjar yang diberikan bendahara itu tidak bisa kita SPJ kan nah.. itu kita akan kembalikan, itu adalah kendala namanya kendala saya tidak bisa menyelesaikan anggaran yang sudah di anggarkan. Nah.. e.. tentunya itu akan kita berikan penjelasan karena apa lembur hanya.. maksimal hanya dilaksanakan menye.. menyesuaikan pekerjaan nah... e.. sisa anggaran akan digunakan untuk pelaksanaan lembur yang akan datang</p>	
18 : Taufik Amrullah, S.T., M.M.					<p>Ya secara umum kalau sekarang kan karena paling tidak puncak pimpinan itu sudah sudah tahu bahwa aset berpengaruh terhadap opini, maka mereka sekarang sudah mau memperhatikan pengurus barang itu. Sehingga yang dulunya pengurus barang yang tidak diperhatikan sekarang sudah mendapat perhatian.</p>

Nama	a. Penyampaian Dokumen Perencanaan di Tingkat SKPD Tidak Tepat Waktu	b. Sebagian Besar Masyarakat Belum Bisa Mengakses Informasi PKD	c. Tidak Ada Petugas yang Mengakuntasikan Transaksi di PPKD	d. Masih Adanya Persoalan Rent Seeker dan Penyerapan Anggaran Rendah	e. Kurangnya Strategi Pengelolaan Aset yg Bisa Meningkatkan Pendapatan Daerah
					<p>Ini kan akan berbeda di dalam pelaksanaan pekerjaan. Sehingga secara umum ya permasalahan-permasalahan yang ada itu hanya permasalahan-permasalahan yang tidak begitu kompleks seperti dulu kan gitu. sehingga ee bisa kita atasi, kita selesaikan dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Karena kalau kita awalnya dulu goalnya adalah mencapai opini WTP kan berarti masuk didalam tataran penata usahaan. Penata usahaan sudah clear berarti sekarang sudah masuk didalam pengamanan. Pengamanan selesai dengan baik nanti kan masuk dioptimalisasi. Nah, inilah yang sekarang saya ingin juga mendukung kebijakan besar juga yang sekarang berusaha untuk bagaimana mendapat ee membuat strategi pengelolaan aset itu bisa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, ee langkah yang ingin saya lakukan untuk itu ini untuk tahun 2018 kita mencoba untuk membuat roadmap tentang pengelolaan BUMD yang dalam tanda kutip adalah merupakan kekayaan yang dipisahkan. Ya kan itu. Nah, salah satunya adalah untuk penguatan permodalan BUMD, kita mencoba menyertakan modal dalam bentuk aset yang biasanya kita penyertaan modal kan dalam bentuk uang. Nah, ini kita coba untuk tahun 2018 ini menyertakan modal tanah kepada dua BUMD, yang dalam hal ini adalah BPD Bank Pasar dan PT. SHK Aset Adikarta masing-masing satu bidang.</p>